Media Title	Bisnis Indonesia		
Head Line	Penugasan HK Molor Lagi		
Date	12 Feb 2014	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	30	Article Size	
Journalist	Dimas Novita Sari	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

► TRANS-SUMATRA

Penugasan HK Molor Lagi

JAKARTA—Peraturan Presiden mengenai penugasan PT Hutama Karya (HK) untuk menggarap jalan tol trans-Sumatra masih terganjal pengkajian ulang mengenai beleid tersebut, padahal sebelumnya aturan itu ditargetkan terbit akhir tahun lalu.

Dimas Novita Sari
dimas.novita@bisnis.co.id

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan Sekretariat Kabinet telah mengembalikan draf perpres tersebut kepada Kementerian Koordinator Perekonomian.

"Ada beberapa yang minta dibahas lagi jadi belum bisa diproses," katanya, Selasa (11/2).

Tanpa menyebutkan poin apa yang perlu dibahas, Djoko mengatakan, dirinya akan mengkaji ulang beberapa hal yang dipertanyakan tersebut.

Setelahnya barulah diberikan kepada Menteri Koordinator Perekonomian untuk dibahas pada rapat terbatas.

"Langsung saja dirataskan setelah selesai saya corat-corek permasalahan," jelasnya.

Namun, Djoko belum dapat memastikan kapan dirinya merampungkan kajian ulang peraturan tersebut.

Seperti yang diketahui, pada Mei tahun lalu, pemerintah telah merevisi PP No. 15/2005 tentang Jalan Tol sebagai langkah awal untuk penugasan mega-proyek senilai Rp360 triliun.

► Sekretariat Kabinet kembalikan draf perpres kepada Kemenko Perekonomian

► Kepastian mengenai penganggaran PMN diduga sebagai penyebab keterlambatan.

Adapun dasar penugasan tersebut ialah UU No. 38/2004 tentang Jalan, UU No. 19/2003 tentang BUMN, PP No. 43/2013 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 15/2005 tentang Jalan Tol.

Kemudian PP No. 45/2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembumbaran BUMN, dan rancangan Perpres tentang Penugasan Pengusahaan Jalan Tol Trans-Sumatra kepada PT Hutama Karya.

Penugasan tersebut didasarkan pada rendahnya nilai kelaikan jalan tol sepanjang 2.608 km tapi bernilai ekonomi tinggi, sehingga tidak ada investor yang berminat.

Beberapa ruas jalan tol trans-Sumatra pernah ditender oleh pemerintah melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), akan tetapi tidak ada investor yang minat.

BERTRANSFORMASI

Melihat kondisi tersebut, pemerintah menugaskan BUMN yang 100% sahamnya masih dimiliki negara, sehingga pemerintah juga dapat berinvestasi melalui BUMN tersebut. Hal ini juga ditujukan agar realisasi mega infrastruktur ini dapat dipercepat.

Dengan penugasan tersebut, Hutama Karya harus bertransformasi untuk fokus menggarap proyek jalan bebas hambatan yang nilainya mencapai Rp350 triliun.

Selain itu, karena proyek tersebut merupakan penugasan, maka perseroan akan mendapatkan penyertaan modal negara (PMN) sebagai modal untuk menggarap 23 ruas jalan tol terse-

Proyek Jalan Tol Utama Trans-Sumatra

Ruas	Panjang (Km)	IRR (%)	Perkiraan Investasi (Rp Triliun)
Lampung-Palembang	358	17	44
Palembang-Pekanbaru	610	13	95
Pekanbaru-Medan	548	16	64
Medan-Banda Aceh	460	9	95
Palembang-Bengkulu	303	9	63
Pekanbaru-Padang	242	11	35
Medan-Sibolga	172	7	30

but. Hutama Karya akan mendapatkan PMN sebesar 30% atau sekitar Rp94 triliun. Modal ini akan menjadi saham, bukan pemberian gratis, dan pengucurannya dilakukan secara bertahap.

Sementara itu, sumber *Bisnis* yang mengetahui hal itu mengatakan permasalahan tersebut ialah kepastian mengenai penganggaran PMN.

Pasalnya, jika pada tahun ini perpres tersebut diteken, APBN harus mengucurkan PMN Rp7,1 triliun dengan rincian Rp5,1 triliun tahun ini dan Rp2 triliun dari sisa anggaran tahun lalu yang tidak terserap.

"Jadi, Kementerian Keuangan ini perlu sinkronisasi antara penganggaran dengan penugasan," katanya kepada *Bisnis*, Selasa (11/2).

Pemerintah, katanya, mengkhawatir-

kan jika PMN tersebut dianggarkan, namun perpres tidak jadi diteken, ataupun sebaliknya.

Kemungkinan-kemungkinan tersebut telah dibahas pada Selasa, (11/2), melibatkan Menteri Keuangan, Setkab, Menteri PU, Menko Perekonomian, dan Menteri BUMN.

"Hasilnya apa saya belum tahu. Yang pasti itu akan ditindaklanjuti," paparnya. ■